

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris yang Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sebutan negara agraris untuk Indonesia didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini memiliki luas lahan pertanian yang sangat besar dan kekayaan alam yang beragam serta melimpah. Keberadaan petani memegang peranan yang sangat penting dalam konteks negara agraris ini, mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya di bidang pertanian (Jorgi et al., 2019). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh (Badan Pusat Statistik, 2022) pada bulan Agustus 2022, dari total penduduk yang aktif bekerja dengan jumlah 135,3 juta orang, sebanyak 29,96% di antaranya bekerja dalam sektor pertanian. Angka ini memberikan gambaran bahwa jumlah orang yang bekerja sebagai petani di Indonesia mencapai angka sekitar 40,64 juta individu. Walaupun Indonesia terkenal dengan populasi petani yang signifikan, realitasnya menunjukkan bahwa masih banyak petani yang berjuang untuk mengatasi tantangan ekonomi, sehingga mereka terjebak dalam kondisi kemiskinan. Fenomena ini memunculkan perhatian bagi pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan dukungan berupa subsidi untuk input pertanian seperti pupuk. Penggunaan pupuk adalah salah satu hal yang sangat penting dalam mewujudkan praktik pertanian modern.

Pupuk tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kualitas tanaman dengan memberikan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, yang mendukung pertumbuhan yang kuat dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas (Putri et al., 2022). yang sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Pasal 1 Ayat 8 berbunyi “Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi”. Peraturan ini berfokus pada penyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian (Kementan, 2022).

Penerapan kartu tani bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih jelas, efisien, dan adil dalam mendistribusikan, mengendalikan, serta mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan dengan benar kepada petani yang memenuhi syarat, dengan memastikan transparansi dan ketepatan dalam semua aspek prosesnya. Dengan adanya kartu tani, diharapkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi akan menjadi lebih terbuka dan sesuai dengan prinsip-prinsip 6T (enam tepat), yaitu Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu. Ini akan menghasilkan distribusi yang lebih efektif dan berdampak positif pada para petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi.

Kebijakan Kartu Tani dibentuk sebagai respons terhadap berbagai insiden penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang merugikan banyak pihak, terutama petani (Riki et al., 2022). Dengan demikian, program Kartu Tani bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih aman dan efektif.

Tanah pertanian di Kabupaten Boalemo meliputi area persawahan dan tanah kering. Pertanian di lahan kering beraneka ragam, dengan tanaman padi ditanam pada musim hujan dan jagung atau tanaman palawija seperti kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar ditanam pada musim kemarau. Sebaliknya, sawah hanya ditemukan di beberapa kecamatan, yaitu Wonosari, Paguyaman, Manangu, Botumoito, dan Dulupi. Di sini, padi bisa ditanam sepanjang tahun karena tersedia pasokan air baik dari hujan maupun melalui sistem irigasi teknis dan sederhana. Dengan berlimpahnya hasil pertanian seperti padi dan jagung di Kabupaten Boalemo, sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Namun, sayangnya, mereka dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Penyelenggaraan pupuk bersubsidi di Kabupaten Boalemo telah berlangsung cukup lama, namun sayangnya, distribusinya belum mencapai ke semua petani secara merata. Terdapat masalah dalam pengelolaan pupuk bersubsidi, di mana sebagian besar manfaatnya masih berpusat pada sejumlah orang tertentu, dan pendistribusiannya seringkali tidak mencapai sasaran yang seharusnya. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para petani di Kabupaten Boalemo adalah ketidakmerataan distribusi pupuk bersubsidi yang dikelola oleh pemerintah (Bakue et al., 2021).

Program kartu baru diberlakukan di Pulau Jawa, namun di wilayah Indonesia Timur, distribusi program kartu tani dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Pertanian dan BANK BRI Pusat. Dalam kerja sama ini, BANK BRI Pusat bertanggung jawab untuk menyalurkan Kartu Tani kepada petani melalui unit-unit BANK BRI di berbagai kabupaten. Proses distribusi ini melibatkan langkah-langkah yang terdokumentasi, di mana BANK BRI Pusat mengeluarkan surat resmi kepada pemerintahan kabupaten terkait. Kabupaten Boalemo menerapkan penggunaan kartu tani di dua kecamatan besar di Kabupaten Boalemo yakni kecamatan Paguyaman, Desa Diloato dan kecamatan Wonosari, Desa Bongo II. Melalui Kartu Tani, program bantuan pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah diakses oleh petani-petani kecil yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan pupuk dengan harga terjangkau. Implementasi Kartu Tani di Desa Diloato dan Desa Bongo II menghadapi tantangan yang signifikan, di mana keberlangsungannya tidak berjalan secara optimal. Dalam kerangka program ini, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangan yang mencolok adalah minimnya informasi yang terkait penggunaan Kartu Tani. Hal ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan petani, yang kesulitan memahami tata cara yang seharusnya mereka lakukan dengan Kartu Tani yang mereka miliki. Terdapat kekosongan informasi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pemanfaatan Kartu Tani sebagai alat bantuan pertanian. Selain itu, mayoritas petani di kedua desa tersebut belum menerima Kartu Tani, sehingga mereka tidak dapat mengakses manfaat yang seharusnya mereka peroleh melalui

program ini. Keterbatasan distribusi Kartu Tani juga berdampak pada pemahaman yang terbatas di kalangan petani mengenai cara penggunaan yang efektif.

Berangkat dari permasalahan diatas, Program Kartu Tani dengan pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, perlu ditekankan bahwa studi ini sangat relevan dan mendesak. Kabupaten Boalemo adalah salah satu daerah dengan potensi pertanian yang tinggi, dan kesuksesan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani kecil di wilayah tersebut. Namun, sejumlah kendala dan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya perlu segera diatasi agar program ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu, juga perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan petani kecil di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Boalemo, termasuk masalah distribusi, pemahaman petani, dan tingkat partisipasi petani dalam program tersebut. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas serta dampak positif program ini terhadap petani kecil di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kartu Tani dengan pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan Program Kartu Tani dengan pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Program Kartu Tani dengan pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi dan meningkatkan efektivitas program.
- b. Menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan partisipasi petani dalam Program Kartu Tani.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan fondasi teoretis yang mendukung perumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Implementasi Program Kartu Tani dalam pengadaan pupuk bersubsidi merupakan isu penting dalam konteks pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja teoretis dan kontekstual yang mendukung

penelitian ini. peneliti akan menggali berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Program Kartu Tani dan distribusi pupuk bersubsidi dalam pelaksanaan program ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang literatur yang ada, kami akan dapat merinci kerangka konseptual dan hipotesis penelitian, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang akan kami isi dalam penelitian ini. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	(Nirwana & Izharsyah, 2022)	Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan	Penelitian ini membahas tentang Program E-Rdck yang melibatkan kerjasama antara Kelompok Tani Nusa dan Koperasi Unit Desa untuk mengumpulkan data tentang lahan pertanian setiap petani dan mendistribusikan pupuk subsidi melalui kelompok tani dalam lingkungan mereka. Beberapa petani sudah terdata melalui program pemerintah yang terkait dengan Dinas Pertanian Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi pengawasan internal yang diterapkan dalam penyaluran pupuk subsidi dalam rangka meningkatkan transparansi Program E-rdck di Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan. Metodenya adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan wawancara mendalam (in-depth interview). Analisis data dilakukan dengan metode analisis data induktif yang berfokus pada penarikan kesimpulan dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang lebih umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi pengawasan internal telah diterapkan dalam upaya menjaga transparansi

			Program E-rdck di Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan, implementasinya belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal.
2.	(Faizin, 2019)	Efektifitas Program Kartu Tani Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan	Penelitian ini menganalisis Kartu Tani, yang berfungsi sebagai alat transaksi untuk pembelian pupuk bersubsidi, adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian pupuk dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Kadur, Kabupaten Pamekasan, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodenya dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kartu Tani bukan hanya alat transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan uang, melakukan transaksi, mengakses pinjaman, dan juga sebagai alat untuk menerima subsidi pupuk. Kartu Tani ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, yang dapat diukur dari kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarga mereka.
3.	(Kasiami, 2020)	Hambatan-Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kabupaten Bojonegoro	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis rintangan-rintangan yang terjadi selama proses distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani di Kabupaten Bojonegoro. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara cermat menggunakan teknik purposive sampling, dengan total 72 individu yang telah diidentifikasi sebagai partisipan

			<p>penelitian. Analisis data yang dilakukan mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang memiliki wawasan yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemahaman terhadap isi kebijakan, ketersediaan informasi, dukungan yang ada, serta pembagian sumber daya dalam konteks penyaluran pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam proses distribusi pupuk bersubsidi adalah ketidaksesuaian isi kebijakan dengan kebutuhan lokal. Pemerintah kabupaten masih belum menunjukkan upaya yang memadai dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan khusus di tingkat lokal.</p>
4.	(Jufri et al., 2022)	Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu Tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Kartu Tani dilakukan di Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dan faktor-faktor apa yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus sebagai kerangka metodologi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode snowball sampling dan melibatkan beberapa pihak, termasuk Kepala Dinas Pertanian atau perwakilannya, pemilik toko yang menjual pupuk subsidi, serta petani yang menggunakan Kartu Tani. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Data yang terhimpun kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan</p>

			<p>penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa indikator, seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan Kartu Tani di Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang melibatkan aspek-aspek seperti lingkungan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, karakteristik kebijakan itu sendiri, serta kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.</p>
5.	(Charjin et al., 2022)	<p>Persepsi Petani Jagung Terhadap Program Kartu Tani di Kelurahan Jumerto Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi petani jagung terhadap Program Kartu Tani, mengevaluasi tingkat kepuasan petani jagung terhadap Program Kartu Tani serta harapan yang dimiliki petani jagung terhadap masa depan Program Kartu Tani. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode fenomenologi. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di Desa Jumerto Lor, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam menganalisis data, digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan mengacu pada metode Miles dan Hubberman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa petani jagung memiliki pemahaman tentang manfaat Program Kartu Tani terutama dalam konteks penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, mereka kurang mengetahui manfaat lain yang bisa diperoleh dari Kartu Tani, seperti fungsi tabungan, kemungkinan pinjaman, dan kemampuan transfer dana. Petani jagung secara umum merasa puas dengan Program Kartu Tani, meskipun ada catatan bahwa kepuasan ini tidak</p>

			<p>selalu dirasakan oleh petani yang lebih tua. Di sisi harapan, petani jagung mengharapkan perbaikan dalam hal kemudahan penggunaan Kartu Tani agar program ini dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengendalikan harga pupuk.</p>
6.	(Mahendra et al., 2021)	<p>Pengaruh Program Kartu Tani Terhadap Penurunan Biaya Pupuk Pada Petani Padi</p>	<p>Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak penggunaan Kartu Tani dalam mengurangi biaya pupuk bagi para petani. Dalam penelitian ini, responden yang terlibat adalah petani sejumlah 27 orang yang dipilih berdasarkan luas lahan pertanian yang mereka kelola dan jenis komoditas yang mereka tanam. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dengan detail aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani serta total biaya yang dikeluarkan oleh mereka untuk pembelian pupuk kimia. Hasil analisis deskriptif mengungkapkan adanya penurunan rata-rata biaya pupuk sebesar IDR 1.316.296, mengubah biaya awal dari IDR 2.032.592 menjadi hanya IDR 716.296. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh petani sebelum dan setelah program Kartu Tani signifikan, dengan nilai Sig. 0.045 atau <0.05. Oleh karena itu, hasil uji t menunjukkan bahwa penurunan biaya pupuk adalah signifikan. Hasil analisis Wilcoxon mengindikasikan bahwa seluruh responden mengalami penurunan biaya pupuk, yang terlihat dari peringkat negatif yang diberikan oleh seluruh 27 responden. Hal ini menggambarkan bahwa dampak penggunaan Kartu Tani dalam mengurangi biaya pupuk sangat signifikan bagi para petani.</p>

7.	(Ashari & Hariani, 2019)	Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara	<p>Penelitian ini membahas tentang Kegiatan pertanian saat ini yang sangat bergantung pada penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi lahan dan produktivitas komoditas pertanian. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh para petani adalah kelangkaan pupuk, yang menghambat upaya mereka dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan menghadirkan Kartu Tani, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pupuk bersubsidi sambil memberikan kemudahan dalam layanan perbankan. Kartu Tani ini berbentuk kartu debit co-branding BRI dan digunakan dengan cara diproses melalui mesin BRI EDC (Electronic Data Capture) yang ditempatkan di stan pengecer. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengukur efektivitas program ini dengan menggunakan empat indikator, yaitu pencapaian target, kesuksesan mencapai tujuan keseluruhan, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, serta sistem pengawasan yang bersifat edukatif. Evaluasi yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas program ini meliputi meningkatkan sosialisasi secara rutin, melakukan regenerasi sumber daya manusia terutama yang terkait dengan petani yang lebih tua, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program Kartu Tani, serta meningkatkan koordinasi antara pengecer kios lengkap, petani, dan Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan program ini berjalan lebih efektif dan</p>
----	--------------------------	--	--

			memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan masyarakat setempat.
8.	(Sripadmaningrum, 2022)	Evaluasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur	Penelitian ini menganalisis tentang kesejahteraan petani yang menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah pemberian subsidi pupuk kepada petani. Evaluasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi merupakan langkah untuk menyelidiki masalah yang mungkin timbul dalam proses distribusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, seperti kekhawatiran petani terkait penyerahan data pribadi seperti KTP dan kartu keluarga untuk dimasukkan ke dalam sistem e-RDKK. Selain itu, terdapat juga kesulitan dalam koordinasi antara lembaga pemerintah dan PT. Aneka Tani Mandiri. Meskipun telah ada sosialisasi mengenai penggunaan mesin EDC (Electronic Data Capture), namun belum setiap toko pengecer memiliki mesin tersebut. Penting untuk mencatat bahwa kesuksesan pelaksanaan kebijakan seharusnya terlihat dari manfaat yang diterima oleh para petani. Namun, ada isu-isu terkait akuisisi data dan penunjukan kuota yang masih belum sesuai dengan kenyataan lapangan. Tingkat kepercayaan yang rendah dari petani terhadap pejabat menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih efektif terkait pengumpulan data mengenai penggunaan pupuk, serta perluasan sistem pelaporan untuk menghindari ketidaksesuaian data.
9.	(Wijayanto & Lestari, 2022)	Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi	Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui Program Kartu Tani berlangsung di antara petani nanas di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

		Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi di lapangan, serta analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tahap pengajuan, penerbitan, dan penarikan pupuk. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian hasil yang optimal. Faktor-faktor yang mendukung implementasi program ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, alokasi anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Di sisi lain, faktor-faktor yang menghambat mencakup kendala dalam aksesibilitas pupuk bersubsidi karena jarak yang jauh dan biaya yang tinggi, kesulitan dalam penyusunan dan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta kurangnya jaringan yang kuat dalam mengakses Kartu Tani.
1 0.	(Zulkifli, 2022)	Implementasi Kartu Tani di Desa Sumber Brantas Kota Batu	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kartu Tani di Desa Sumber Brantas, Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dalam menetapkan sasaran kebijakan dan kegiatan sosialisasi dianggap cukup baik. Namun, ketersediaan tenaga ahli pertanian belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari hasil analisis penelitian, di mana jumlah sumber daya

			<p>manusia yang memenuhi spesifikasi ahli pertanian masih kurang, dengan pembagian tugas satu orang untuk satu desa, dan terdapat petugas yang melayani 2 desa karena keterbatasan ahli pertanian. Koordinasi dan kolaborasi antara lembaga terkait juga belum berjalan dengan baik. Pemahaman pelaksana terhadap prosedur operasional standar belum optimal, yang terlihat dari keberadaan petugas yang tidak disiplin dalam menjalankan peran mereka.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, Program Kartu Tani diidentifikasi sebagai salah satu inisiatif penting pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar untuk membantu petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi dengan lebih efisien, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kendala-kendala seperti kurangnya informasi, ketidakmerataan distribusi kartu tani, dan pemahaman terbatas tentang manfaat program ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain itu, pelaksanaan Program Kartu Tani juga dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis, regulasi, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait juga diakui sebagai kunci kesuksesan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam konteks lokasi penelitian yang berfokus pada Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini akan lebih menekankan implementasi Program Kartu Tani dalam pengadaan pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga akan memberikan wawasan yang lebih

mendalam dan relevan terhadap dinamika serta tantangan yang ada di wilayah tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada metodologi penelitian, dimana dalam penelitian ini, menggunakan metode observasi langsung dan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap beberapa petani yang tidak mendapatkan kartu tani dan petani yang mendapatkan kartu tani serta beberapa stakeholder terkait seperti pemerintah setempat.

1.6 Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Gerston, pengertian kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat di berbagai tingkatan administratif. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang bersifat publik. Dengan kata lain, kebijakan publik merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang memengaruhi masyarakat secara umum. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, keputusan, atau program yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi atau mengatur isu-isu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Kebijakan publik bertujuan untuk mempengaruhi atau mengatur perilaku, proses, atau hasil dalam masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah atau masyarakat. Kebijakan publik bisa berupa regulasi, program sosial,

perubahan hukum, atau langkah-langkah lainnya yang memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berfungsi.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- Penyusunan agenda (Agenda Setting).

Pada fase ini, pemerintah yang berwenang membawa masalah kebijakan ke perhatian public. Isu kebijakan ini mencakup nilai, kebutuhan, atau peluang yang masih belum terpenuhi, dan dapat diidentifikasi sebagai area yang memerlukan perbaikan atau pencapaian melalui tindakan publik. Proses perumusan masalah melibatkan langkah-langkah seperti mencari masalah, mendefinisikan masalah dengan lebih jelas, merinci karakteristik masalah tersebut, dan mengenalkan masalah ini kepada masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

- Formulasi Kebijakan (Policy Formulation),

Pemerintah merancang berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada. Salah satu metode yang digunakan dalam proses ini adalah peramalan atau forecasting, yang merupakan metode untuk menghasilkan informasi yang relevan tentang kondisi sosial yang mungkin terjadi di masa depan. Peramalan ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang telah ada mengenai masalah kebijakan yang sedang

dibahas. Dengan kata lain, peramalan membantu pejabat dalam merencanakan kebijakan dengan memproyeksikan situasi yang mungkin terjadi di masa mendatang berdasarkan data yang ada saat ini.

- Adopsi Kebijakan (Policy Adoption),

Pada tahap ini alternatif-alternatif kebijakan dipertimbangkan dan dipilih untuk diadopsi dengan dukungan mayoritas atau melalui konsensus lembaga pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah pembuatan Rekomendasi Kebijakan. Tugas pembuatan rekomendasi kebijakan memerlukan analisis mendalam untuk menentukan alternatif terbaik dan alasan mengapa alternatif tersebut dipilih. Oleh karena itu, prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan pertimbangan etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Dalam pembuatan rekomendasi kebijakan, ada enam kriteria utama yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas (efektif dalam mencapai tujuan), efisiensi (penggunaan sumber daya yang efisien), kecukupan (mencukupi kebutuhan masyarakat), perataan (menjaga keadilan), responsivitas (mengakomodasi perubahan), dan kelayakan (memiliki dasar yang kuat secara finansial dan praktis).

- Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Dalam fase ini, keputusan kebijakan yang telah diambil dijalankan oleh unit-unit administrasi dengan menggerakkan sumber daya yang tersedia, terutama dalam hal aspek finansial dan sumber daya manusia. Selama proses ini, juga ada pemantauan hasil kebijakan yang memegang

peran penting dalam analisis kebijakan. Pemantauan, atau pengawasan, adalah metode yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai kaitan antara penyebab dan dampak dari kebijakan publik yang diterapkan. Dalam konteks ini, pemantauan memiliki empat peran utama dalam analisis kebijakan, yakni memberikan penjelasan mengenai hasil kebijakan, melakukan pencatatan yang akurat, melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan memastikan bahwa kebijakan diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku (compliance).

- Penilaian Kebijakan (Policy Assessment),

Dalam tahap ini, unit-unit pemeriksaan melakukan evaluasi terhadap apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Selama proses ini, juga terdapat pemantauan hasil kebijakan yang menjadi bagian penting dalam analisis kebijakan. Pemantauan, atau monitoring, adalah prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai hubungan sebab-akibat dari kebijakan publik yang diterapkan. Dalam konteks ini, pemantauan memiliki empat peran utama dalam analisis kebijakan, yakni memberikan penjelasan mengenai hasil kebijakan, melakukan pencatatan yang akurat, melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan memastikan bahwa kebijakan diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku (compliance).

2. Teori Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka menerapkan keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi langkah-langkah operasional yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, implementasi juga melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai perubahan, baik yang berskala besar maupun kecil, yang telah ditetapkan oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh organisasi publik. Semua tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut George C. Edwards III implementasi kebijakan berfokus pada empat variabel kunci dalam kebijakan publik: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini harus diterapkan secara bersamaan karena saling berkaitan. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman tentang implementasi kebijakan dengan memecahnya menjadi komponen prinsip yang lebih sederhana. Implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara banyak faktor. Sub-kategori dari faktor-faktor utama ini disajikan untuk menunjukkan pengaruh mereka pada implementasi. Dalam ringkasannya, George C. Edwards III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai elemen yang saling terkait. Faktor –

faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

- Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157), komunikasi menjadi salah satu faktor krusial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan publik. Keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif. Implementasi yang berhasil akan terwujud apabila para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang baik tentang tugas-tugas yang mereka hadapi. Agustino juga mengidentifikasi tiga indikator penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan variabel komunikasi. Ini meliputi kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat, keberlanjutan komunikasi yang memastikan informasi tetap mengalir secara konsisten, dan keberhasilan dalam memperoleh respons atau umpan balik yang tepat dari penerima pesan. Dengan mengacu pada indikator-indikator ini, evaluasi terhadap proses komunikasi dapat membantu dalam menilai sejauh mana implementasi kebijakan bisa berhasil. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) menyebutkan bahwa ada tiga variabel penting dalam komunikasi yaitu:

a) Transmisi

Komunikasi yang lancar memengaruhi hasil yang baik dalam implementasi. Namun, seringkali ada hambatan karena kompleksitas struktur birokrasi yang menimbulkan kesalahpahaman atau

miskomunikasi, sehingga pesan yang awalnya diinginkan bisa terdistorsi sebelum sampai pada pelaksana kebijakan. Penting bagi pelaksana, terutama street-level-bureaucrats, untuk menerima informasi yang jelas dan tanpa ruang interpretasi ganda agar implementasi berjalan sesuai harapan.

b) Konsisten

Instruksi yang konsisten dan jelas dalam proses komunikasi perlu ditegaskan atau dijalankan. Ketika instruksi tersebut sering berubah-ubah, hal ini dapat menciptakan kebingungan di kalangan pelaksana di lapangan. Penting untuk memastikan konsistensi pesan agar pelaksana memahami tugas mereka tanpa adanya perubahan yang mengganggu.

c) Kejelasan

Berdasarkan penelitian Edward III yang disimpulkan oleh Winarno (2005:127), terdapat sejumlah kendala umum yang sering muncul dalam proses transmisi komunikasi yaitu sebagai berikut.

- Adanya konflik antara para pelaksana kebijakan dengan instruksi yang diberikan oleh pembuat kebijakan dapat menyebabkan gangguan dan perubahan yang langsung dalam komunikasi kebijakan.
- Pesan yang disampaikan melalui berbagai tingkatan hierarki birokrasi dapat mengalami distorsi karena panjangnya rantai informasi, yang kemudian dapat menghasilkan bias informasi.

Selain itu, masalah dalam pemahaman informasi juga disebabkan oleh persepsi serta keterbatasan para pelaksana dalam memahami persyaratan kebijakan.

Menurut Winarno (2005:128), faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik umumnya meliputi kompleksitas kebijakan, kurangnya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan publik, kesulitan memulai kebijakan baru, serta kecenderungan untuk menghindari bertanggung jawab atas kebijakan. Proses implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor mulai dari manajemen tingkat atas hingga birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut pengaturan yang jelas dari proses komunikasi ke semua tahap tersebut. Jika terjadi ketidaksepakatan di antara pelaksana, kebijakan tersebut dapat diabaikan dan menjadi terdistorsi. Winarno (2005:129) menyimpulkan bahwa semakin banyak aktor pelaksana yang terlibat, semakin besar kemungkinan adanya hambatan dan distorsi.

Faktor komunikasi memiliki dampak besar pada penerimaan kebijakan oleh kelompok sasarannya, sehingga kualitas komunikasi memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, distribusi isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan sangat memengaruhi implementasinya. Dalam konteks ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran memegang peran penting.

- Sumber Daya

Sumber daya merupakan bagian dari sebuah sistem yang memiliki implikasi secara ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya terkait dengan biaya atau pengorbanan yang langsung dikeluarkan oleh organisasi, mencerminkan nilai atau potensi kegunaannya dalam mengubah input menjadi output. Dari segi teknologis, sumber daya terkait dengan kapabilitas transformasi organisasi (Tachjan, 2006:135).

Menurut Edward III, yang dikutip oleh Agustino (2006:158), menegaskan bahwa sumber daya memiliki peranan penting dalam menjalankan implementasi kebijakan yang efektif. Lebih lanjut, ini menunjukkan bahwa sumber daya bukan hanya elemen penting, tetapi juga merupakan fondasi krusial dalam menjamin kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Keberadaan dan pengelolaan sumber daya memiliki dampak yang signifikan terhadap keluaran atau hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a) Staf

Sumber daya kunci dalam menjalankan kebijakan adalah staf atau pegawai, yang sering disebut sebagai street-level bureaucrats. Salah satu penyebab kegagalan umum dalam implementasi kebijakan adalah kekurangan, ketidakcukupan, atau kurangnya

kompetensi staf dalam bidangnya. Hanya dengan menambah jumlah staf dan pelaksana tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Yang dibutuhkan adalah kehadiran staf yang memadai dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai (kompeten dan berkapasitas) untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

b) Informasi

Dalam proses implementasi kebijakan, informasi memiliki dua aspek: yang pertama adalah informasi terkait dengan metode atau cara untuk menerapkan kebijakan. Kedua adalah informasi mengenai data yang mencerminkan sejauh mana para pelaksana mematuhi peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c) Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya keuangan menjadi landasan yang mendukung kelancaran proses pelaksanaan. Ini melibatkan bukan hanya alokasi dana yang memadai, tetapi juga manajemen serta penggunaan dana secara efektif. Alokasi dana yang memadai memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, memperkuat infrastruktur, menyediakan pelatihan, serta memastikan penyebaran informasi yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan. Hal

ini mencakup pengelolaan keuangan yang bijaksana dan transparan agar tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun implementor memiliki staf yang cukup, berkualitas, dan kompeten, keberhasilan implementasi kebijakan akan terhambat tanpa adanya dukungan fasilitas seperti sarana dan prasarana.

Untuk berhasil dalam implementasi program, sumber daya yang mencakup staf, keterampilan, informasi, kewenangan, dan fasilitas sangat penting. Kekurangan sumber daya manusia dapat menghambat pengawasan yang efektif, dan jika staf terbatas, perlu meningkatkan keterampilan mereka melalui manajemen SDM yang baik. Informasi yang tepat juga krusial, dan kurangnya pengetahuan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah. Selain itu, memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan mengatur keuangan, serta fasilitas yang mencukupi, seperti kantor dan dana, sangat diperlukan untuk menjalankan program dengan sukses.

- Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143), kecenderungan atau disposisi individu memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap positif atau dukungan terhadap kebijakan yang

diimplementasikan, kemungkinan besar kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Sebaliknya, jika pelaksana memiliki sikap negatif atau menolak kebijakan karena adanya konflik kepentingan, implementasi kebijakan akan menghadapi hambatan serius.

Edward III mengemukakan konsep "zona ketidakacuhan" di mana pelaksana kebijakan menggunakan kebebasan mereka (diskresi) untuk menghambat implementasi kebijakan dengan cara-cara yang halus, seperti mengabaikan, menunda, atau melaksanakan tindakan penghambatan lainnya. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Sikap atau disposisi para pelaksana dapat menjadi kendala nyata dalam implementasi kebijakan jika personel tersebut tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pejabat yang memiliki posisi lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan penempatan personel yang menjalankan kebijakan harus mempertimbangkan individu yang memiliki komitmen yang kuat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b) Insentif merupakan strategi yang direkomendasikan untuk mengatasi tantangan sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Karena pada dasarnya individu bergerak

berdasarkan kepentingan pribadinya, penggunaan insentif oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan. Dengan memberikan keuntungan tambahan atau menambah biaya tertentu, ini dapat menjadi dorongan bagi para pelaksana untuk mematuhi instruksi dengan baik. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok maupun organisasi.

- Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang kompleks memerlukan kerjasama antara berbagai pihak. Ketika struktur birokrasi tidak mendukung implementasi kebijakan, hal ini dapat menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan dan mengakibatkan ketidakefektifan. Dari penjelasan tersebut, pemahaman terhadap struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam analisis implementasi kebijakan publik. Edward III, seperti yang disampaikan oleh Winarno (2005:150), mengidentifikasi dua karakteristik utama dari birokrasi: "Standard Operational Procedure (SOP)" dan "fragmentasi".

a) Standard Operational Procedure (SOP)

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan hasil dari kebutuhan internal akan kepastian terhadap waktu, sumber daya, dan kebutuhan untuk menciptakan keseragaman dalam organisasi yang memiliki kompleksitas dan cakupan yang luas (Winarno, 2005:150). SOP atau prosedur kerja ini umumnya digunakan

untuk mengatasi situasi umum di berbagai sektor, baik dalam sektor publik maupun swasta. Penggunaan SOP memungkinkan para pelaksana untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia dan membantu dalam menstandarisasi tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang memiliki kompleksitas dan jangkauan yang luas. Ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dan keseragaman yang besar dalam penerapan aturan.

Meskipun SOP bisa menjadi kendala dalam implementasi kebijakan baru yang membutuhkan pendekatan atau jenis personel yang berbeda, semakin besar kebijakan tersebut membutuhkan perubahan dalam cara kerja yang sudah ada dalam suatu organisasi, semakin besar kemungkinan SOP menghambat implementasinya. Namun, meskipun dapat menjadi hambatan, SOP juga memiliki manfaatnya. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol yang tinggi atas program-program yang dapat disesuaikan mungkin lebih mudah menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru dibandingkan dengan birokrasi yang kurang memiliki karakteristik seperti itu.

b) Fragmentasi

Menurut Edward III seperti yang dijelaskan oleh Winarno (2005:155), "fragmentasi" merujuk pada penyebaran tanggung jawab terkait suatu kebijakan kepada berbagai badan yang berbeda, yang memerlukan koordinasi di antara mereka. Secara

umum, semakin besar tingkat koordinasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan, semakin rendah kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Fragmentasi ini menyebabkan pandangan yang sempit dari berbagai lembaga birokrasi, yang mengakibatkan konsekuensi utama yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam konteks fragmentasi birokrasi terkait implementasi kebijakan publik, Winarno (2005:153) menyebutkan beberapa hambatan. Pertama, kelemahan terkait otoritas yang tidak kuat dalam pelaksanaan kebijakan karena fungsi-fungsi tertentu terbagi di antara lembaga atau badan yang berbeda. Situasi ini dapat menyebabkan badan-badan tersebut memiliki yurisdiksi yang terbatas pada bidang-bidang tertentu, yang pada gilirannya dapat mengabaikan tugas-tugas penting dalam agenda birokrasi yang beragam. Kedua, pandangan yang terbatas dari setiap badan juga dapat menghambat perubahan. Jika suatu badan memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas misinya, kecenderungan untuk mempertahankan status quo dapat menyebabkan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan baru yang menuntut perubahan.

Dari pembahasan teori implementasi kebijakan diatas, dibandingkan dengan teori-teori implementasi kebijakan lainnya, skripsi ini berfokus pada teori Edward III dalam menjelaskan keberhasilan implementasi program kartu tani melalui komunikasi

Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo. Pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana menjadi fokus utama, di mana tujuan program disosialisasikan secara efektif kepada petani dan pemerintah setempat untuk mencegah distorsi dalam pelaksanaan. Keberhasilan program kartu tani juga bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik SDM yang kompeten maupun dukungan finansial. Karakter positif seperti komitmen dan kejujuran penting bagi SDM yang terlibat. Implementor yang memiliki sifat-sifat baik dapat menjalankan kebijakan sesuai niatan pembuat kebijakan. Kualitas struktur birokrasi, terutama prosedur operasi standar, dianggap penting sebagai panduan implementor. Analisis skripsi ini seluruhnya berlandaskan pada teori implementasi kebijakan Edward III.

1.7 Definisi Konseptual

1. Kebijakan Publik

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat atau lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini mencakup berbagai strategi dan intervensi yang dirancang secara strategis untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada demi kepentingan publik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan perubahan positif, mempromosikan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik juga dapat mencakup keputusan untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat memiliki dampak pada masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan. Meskipun perumusan kebijakan yang baik dan persetujuan konsepnya penting, keberhasilan sebenarnya tergantung pada pelaksanaan yang efektif. Tanpa pelaksanaan yang tepat, sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak yang signifikan di masyarakat atau organisasi yang dituju. Selain itu, pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan faktor-faktor kompleks yang dapat memengaruhi hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang rumit dan dapat melibatkan tantangan yang beragam. Oleh karena itu, manajemen yang baik dan perhatian serius diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

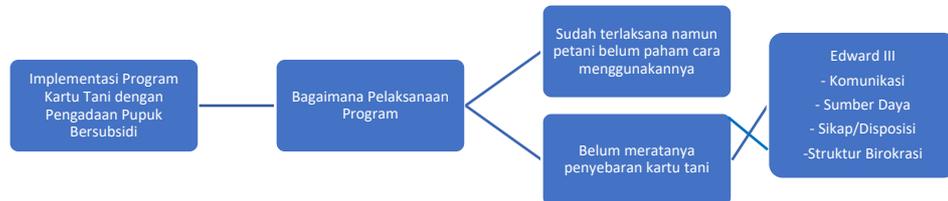
1.8 Definisi Operasional

Tabel 2 Definisi Operasional

No	Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1	Implementasi Kebijakan	Implementasi Program Kartu Tani	Komunikasi	- Transmisi - Kejelasan - Konsisten
			Sumber Daya	- Staf - Informasi - Anggaran - Fasilitas
			Disposisi atau Sikap	- Sikap - Insentif
			Struktur Birokrasi	- SOP - Fragmentasi

1.9 Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian membantu peneliti dalam mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan penelitian dengan cara yang ilmiah dan terstruktur. Metode penelitian dapat berbeda-beda tergantung pada jenis penelitian, pertanyaan penelitian, dan sumber data yang digunakan (Anggito, 2018).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati. Metode ini memiliki fokus pada penjelasan fenomena yang diteliti, mencari pemecahan masalah berdasarkan realitas saat ini, dan memberikan informasi yang relevan untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta aplikasi dalam

berbagai konteks. Pendekatan kualitatif secara garis besar bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual tentang suatu peristiwa atau gejala dengan akurasi yang tinggi. Alasan pemilihan metode kualitatif adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan beragam situasi, membangun hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan, serta sensitivitasnya terhadap perubahan pola nilai yang dihadapi peneliti (Hasan et al., 2022).

Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan fakta-fakta terkait dengan pelaksanaan Program Kartu Tani dengan pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh di lapangan mungkin berupa fakta-fakta yang memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif akan memberikan dorongan yang lebih kuat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, terutama dengan keterlibatan peneliti langsung di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat terhubung secara langsung dengan objek penelitian atau instrumen yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implementasi program tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini terletak di dua kecamatan yang masing-masing memiliki program Kartu Tani, yaitu Kecamatan Paguyaman dengan Desa Diloato dan Kecamatan Wonosari dengan Desa Bongo II. Di kedua

kecamatan dan desa tersebut, peneliti akan melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan implementasi program Kartu Tani dalam pengadaan pupuk bersubsidi. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Program Kartu Tani didistribusikan di dua daerah di Kabupaten tersebut, dan peneliti menemukan aspek yang menarik untuk diinvestigasi dengan pertimbangan-pertimbangan berikut.

1. Kecamatan Paguyaman dengan Desa Diloato:

- Kecamatan Paguyaman terletak di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di wilayah tersebut.
- Desa Diloato adalah salah satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Paguyaman.
- Di Desa Diloato, program Kartu Tani digunakan untuk mengatur dan memfasilitasi pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani setempat.
- Penelitian akan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana program Kartu Tani diimplementasikan di Desa Diloato, termasuk proses penggunaan kartu, kendala yang mungkin dihadapi oleh petani, serta respon pemerintah terhadap pelaksanaan program tersebut.

2. Kecamatan Wonosari dengan Desa Bongo II:

- Kecamatan Wonosari juga terletak di Provinsi Gorontalo, berdekatan dengan Kecamatan Paguyaman.
- Desa Bongo II adalah salah satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Wonosari.

- Di Desa Bongo II, program Kartu Tani juga digunakan dalam pengadaan pupuk bersubsidi.
- Penelitian akan mencakup analisis tentang pelaksanaan program Kartu Tani di Desa Bongo II, termasuk peran serta petani, kendala yang mungkin dihadapi, serta dampak program ini terhadap kegiatan pertanian di desa tersebut.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya dan telah diterbitkan atau dihasilkan oleh pihak lain, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitian mereka. Dalam penelitian ini, data sekunder mungkin termasuk dokumen-dokumen kebijakan pemerintah terkait program Kartu Tani, laporan pelaksanaan program, atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu serupa di wilayah tersebut. Data sekunder berfungsi untuk memberikan konteks yang lebih luas, teori-teori yang relevan, atau informasi tambahan yang mendukung analisis data primer. Data ini juga bisa digunakan untuk membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya atau regulasi yang berlaku (Makbul, 2021).

b. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui pengumpulan data yang baru dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer mungkin mencakup hasil dari wawancara langsung dengan petani, pejabat pemerintah setempat, anggota komunitas, atau pihak-pihak terkait lainnya di Desa Diloato (Kecamatan Paguyaman) dan Desa Bongo II (Kecamatan Wonosari). Data primer digunakan untuk memperoleh wawasan, sudut pandang, pengalaman, dan informasi yang berhubungan secara kontekstual dengan pelaksanaan program Kartu Tani di dua desa tersebut. Ini meliputi pemahaman mengenai hambatan yang mungkin dihadapi oleh petani, cara penggunaan kartu, dan dampak program tersebut pada praktik pertanian (Majid, 2017).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Wawancara Mendalam (Indepth Interview): Teknik ini digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan responden yang terlibat dalam program Kartu Tani seperti: Petani yang mendapatkan kartu tani, petani yang belum mendapatkan kartu tani, dinas pertanian, pemerintah kecamatan dan lain sebagainya. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman,

pandangan, dan pemahaman responden terkait dengan program tersebut.

- Observasi: Observasi digunakan sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk memerhatikan praktik-praktik terkait dengan program Kartu Tani dan dinamika sosial di Desa Diloato dan Desa Bongo II.
- Analisis Dokumen: Teknik ini juga digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti menganalisis dokumen-dokumen terkait program Kartu Tani, seperti kebijakan pemerintah, laporan pelaksanaan program, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu program tersebut.

Tabel 3 beberapa Informan yang akan penulis wawancarai beserta data yang akan penulis cari

No	Informan	Data yang dicari
1	Petani yang mendapatkan kartu tani	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi bagaimana petani menggunakan kartu tani - Sejauh mana pemahaman mereka tentang kartu tani - Apakah dampak yang mereka rasakan ketika mendapatkan kartu tani
2	Petani yang belum mendapatkan kartu tani	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan kenapa petani belum mendapatkan kartu tani - Apakah petani sudah mencari informasi tentang kartu tani
3	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur dan regulasi pendistribusian kartu tani - Data petani yang sudah mendapatkan kartu tani
4	Pemerintah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana pengawasan pemerintah kecamatan tentang pendistribusian kartu tani
5	Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Alur koordinasi kartu tani - Penyampaian Informasi

Pengumpulan data dilakukan dengan hati-hati dan sistematis. Hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan membentuk basis data yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul. Selama proses analisis, peneliti juga akan merujuk pada teori-teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung. Metode ini digunakan untuk memahami dan mengurai data yang diperoleh secara lebih mendalam, sehingga dapat merumuskan temuan yang signifikan untuk penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian prosedur atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengorganisasi, mengolah, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Teknik analisis data bertujuan untuk mengurai data menjadi informasi yang lebih bermakna, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), dengan pendukung dari observasi lapangan dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dimulai dari pengumpulan catatan lapangan (*field notes*) yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kelompok subyek penelitian. Data-data ini kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis untuk membentuk tema-tema yang muncul dari hasil analisis tersebut. Dalam proses analisis, kita juga akan mengacu pada teori-teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung. Teknik ini berfungsi sebagai

landasan untuk memahami, menggali, dan mengurai data yang diperoleh secara lebih mendalam (Ramdhan, 2021).

a. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang sistematis dalam menggali, mengorganisir, dan memilah-milah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses ini, data-data yang relevan dipilih dan dianalisis untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya mengambil bentuk naratif, yang merupakan pendekatan yang mendetail dan sistematis untuk mengorganisir informasi. Dalam bentuk naratif, data-data tersebut diatur secara berurutan dan terstruktur dengan baik, sehingga memungkinkan pembaca atau peneliti lainnya untuk dengan mudah memahami konteks dan makna yang terkandung dalam data tersebut. Hal ini membantu dalam memberikan gambaran yang lebih lengkap dan dalam memahami esensi dari hasil penelitian kualitatif tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil reduksi data tetap berfokus pada rumusan masalah yang ingin dicapai. Data yang telah diorganisir dibandingkan satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan

yang sedang diteliti. Ini merupakan tahap penting dalam rangkaian analisis data karena mengarahkan peneliti untuk merangkum temuan-temuan yang relevan dan mengambil kesimpulan yang signifik